Journal

Pegguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472



Graphical abstract



STUDI TENTANG POLITIK IDENTITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH DALAM PILAKADA 2018 DI KECAMATAN POLEWALI

¹Wahyu Hasanuddin, ²Rustan IR, ³Sjuaib Hannan ¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author Wahyuhasan3@gmail.com

Abstract

The research results show that ethnic identity politics can cause conflicts of interest. In regional election contestations, identity construction causes people to identify themselves with fellow ethnic groups, which leads to ethnocentrism and potential social conflict. However, these conflicts tend to be mild and do not last long. This research underlines the importance of understanding the impact of ethnic identity in local politics, as well as how the theories of primordialism, constructivism, and instrumentalism can explain political dynamics in multi-ethnic societies.

The conclusion of this research is that the term ethnic identity politics is used to manipulate and mobilize the masses to cause voters to choose based on ethnicity which makes the vote gain significant for one group or individual in the 2018 Polman regional elections.

Keywords: Pilkada, Politics, Identity

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas etnis dapat menyebabkan konflik kepentingan. Dalam kontestasi pilkada, konstruksi identitas menyebabkan orang mengidentifikasi diri dengan sesama etnis, yang mengarah pada etnosentrisme dan potensi konflik sosial. Namun, konflik ini cenderung bersifat ringan dan tidak berlangsung lama. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya memahami dampak identitas etnis dalam politik lokal, serta bagaimana teori primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme dapat menjelaskan dinamika politik di masyarakat multi-etnis.

Kesimpulan dari penelitian ini, Istilah politik identitas etnis digunakan untuk memanipulasi dan memobilisasi massa menyebabkan pemilih memilih berdasarkan etnis yang membuat perolehan suara menjadi signifikan terhadap satu kelompok atau individu dalam pilkada 2018 Polman

Kata kunci: Pilkada, Politik, Identitas

Article history

DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1

Received: 2024-07-27 | Received in revised form: 2025-05-23 | Accepted: 2025-05-24

1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keragaman etnis, agama, dan budayanya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika politik identitas. Politik identitas, yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, memanfaatkan perbedaan identitas untuk mendapatkan pengaruh politik. Dalam konteks Indonesia, politik identitas semakin relevan karena negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku yang menggunakan bahasa lokal mereka sendiri. Hal ini menciptakan potensi besar bagi elit politik untuk memanfaatkan perbedaan etnis dalam mencapai tujuan mereka, baik untuk mendapatkan suara dalam pemilu maupun untuk tujuan politik lainnya, termasuk separatisme.

Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat adalah contoh nyata bagaimana politik identitas etnis memainkan peran penting dalam pemilihan lokal. Pada Pilkades 2018, calon kepala daerah berasal dari tiga kelompok etnis utama: Mandar, Bugis, dan Pattae, dengan etnis Mandar sebagai mayoritas yang mendominasi perwakilan politik. Identitas etnis di Polewali Mandar dapat dianalisis melalui tiga pendekatan: primordialisme, yang melihat identitas etnis sebagai warisan alami; konstruktivisme, menekankan pembentukan identitas melalui interaksi sosial dan budaya; dan instrumentalisme, yang melihat identitas etnis sebagai alat yang dapat dimanipulasi oleh elit politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak politik identitas etnis pada pemilihan di Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada bagaimana politik identitas dapat menyebabkan konflik kepentingan dan etnosentrisme, serta memberikan pemahaman tentang dinamika politik di masyarakat multi-etnis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap mampu menganalisis secara mendalam realitas sosial yang dinamis (Mappasere, 2019)

Metode kualitatif membantu dalam memahami polapola interaksi sosial dan menemukan hubungan antara subjek penelitian. penelitian kualitatif melibatkan peneliti yang memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan observasi dan wawancara dengan individu yang mengetahui situasi tersebut. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data, proses, dan makna untuk memahami fenomena sosial berdasarkan bukti dan fakta di lapangan (Sugiono, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan selama dua bulan, sejak Mei hingga Juni 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk menggambarkan peran politik identitas etnis dalam Pilkada 2018. Penelitian ini mengkaji dampak primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme terhadap keputusan pemilih.



- Politik Identitas terhadap Keputusan Pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.
 - a. Primordialisme: Primordialisme adalah pandangan bahwa identitas seseorang diwariskan secara alami dari nenek moyang mereka. Identitas ini terbentuk berdasarkan ikatan darah, asal usul, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Identitas primordial dianggap sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari individu sejak lahir, dan sering kali sulit diubah karena terkait erat dengan nilai-nilai tradisional dan keluarga.Identitas etnis di Kabupaten Polewali Mandar, yang mencakup kelompok Mandar, Bugis, dan Pattae, memainkan peran penting dalam politik lokal. Identitas etnis Mandar, yang merupakan mayoritas, mempengaruhi dominasi dalam proses pemilihan, termasuk jumlah pemilih dan keterwakilan politik. Hal ini sejalan dengan teori primordialisme yang menekankan pentingnya warisan leluhur dalam membentuk perilaku politik dan sosial. Etnis Mandar memiliki jumlah pemilih yang signifikan dan keterwakilan yang kuat dalam pemilihan kepala daerah. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan jumlah populasi, tetapi juga etnis Mandar kekuatan identitas dalam membentuk preferensi politik dan strategi kampanye. Identitas etnis Mandar, diwariskan secara alami dan terkait erat dengan nilai-nilai tradisional serta sejarah keluarga, memainkan peran kunci dalam menentukan hasil pemilihan. (Rustan, 2019)
 - b. Konstruktivisme: Identitas etnis Mandar, selain diwariskan, juga dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya. Elit politik memanfaatkan ikatan etnis ini untuk mobilisasi dukungan. Identitas etnis Mandar diperkuat melalui praktik sosial

- seperti upacara adat dan interaksi komunitas, menjadi alat politik yang efektif dalam memenangkan pemilihan. Identitas Mandar terbentuk dan diperkuat melalui praktik sosial sehari-hari, termasuk upacara adat, pendidikan, dan interaksi sosial di lingkungan komunitas. Elit politik memanfaatkan ikatan etnis ini dengan cara mendekati kelompok etnis Mandar secara khusus, mengakui dan memanfaatkan kekuatan budaya serta solidaritas yang ada di dalam kelompok tersebut. Dalam konteks pemilihan, politisi yang berasal dari atau memiliki hubungan dengan etnis Mandar cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan karena mereka dianggap sebagai representasi autentik dari nilai-nilai kepentingan etnis tersebut.
- c. Instrumentalisme: Politik identitas digunakan oleh elit politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Identitas etnis tidak hanya diwariskan tetapi juga dimanipulasi untuk kepentingan politik. Di Polewali Mandar, politisasi identitas etnis mengarah pada dominasi kekuasaan dan penempatan jabatan birokrasi berdasarkan kesamaan etnis, mengakibatkan ketidakadilan dalam struktur sosial dan politik, ini menunjukkan bahwa politisasi identitas adalah fenomena yang berakar dalam struktur sosial dan budaya Dari masvarakat Polewali Mandar. hasil wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa identitas etnis menjadi alat bagi elit politik untuk memobilisasi dukungan dalam kontestasi pilkada. Dalam kerangka instrumentalisme, identitas difokuskan pada aspek kekuasaan dan digunakan oleh elit untuk mencapai tujuan politik mereka. Elit politik memanfaatkan ikatan etnis dan sentimen kelompok untuk membangun loyalitas dan dukungan politik yang kuat.
- Dampak Politik Identitas Etnis dalam Pilkada di Kabupaten Polewali Mandar
 - a. Dampak Positif: Peran politik identitas etnis ini memiliki efek positif, yaitu meningkatkan persatuan atau integritas etnis karena kesadaran kolektif kelompok. Seperti yang disebutkan sebelumnya, struktur elit politik yang sistematis dan terorganisir membentuk kolektivitas kelompok ini. Individu ditempatkan dalam ruang politik yang samar, di mana paradoks demokrasi terlihat jelas. Kepentingan kelompok mendahului solidaritas politik dalam konteks sosialisasi semu yang diungkapkan Ost. Setiap kelompok etnis Mandar, Bugis, dan Pattae mengalami kondisi kerekatan, terutama selama tahun politik. Politik identitas semakin mengartikulasikan identitas individu dalam masyarakat melalui konstruktivisme politik sebagai alat dan tujuan politik. Mobilisasi massa yang bertujuan untuk kesejahteraan kolektif dan menjamin bahwa kekuatan Ikhwanul diterima baik oleh masyarakat menciptakan kesatuan politik. Politik identitas etnis di Polewali Mandar

- dapat meningkatkan persatuan dan integrasi antar etnis. Ketika elit politik memanfaatkan identitas etnis secara terstruktur, ini dapat memperkuat solidaritas di dalam kelompok etnis dan meningkatkan partisipasi politik di antara mereka.
- b. Dampak Negatif: Politisasi identitas etnis juga dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik antar kelompok etnis. Dominasi kelompok tertentu birokrasi dan pemerintahan dalam menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Etnosentrisme dan egoisme antar etnis dapat mengganggu hubungan sosial, menyebabkan diskriminasi dan ketegangan. Konflik yang terjadi selama pilkada di Polewali Mandar adalah konflik struktural. Keberadaan empat kelompok etnis dalam masyarakat yang pluralis menunjukkan konflik politik yang intens. Kominikasi memainkan peran penting dalam pembentukan etnis oleh mereka yang berkuasa dalam politik. Perjuangan untuk kesejahteraan kelompok memunculkan peta konflik. Karena kelangsungan hidup sekte-sekte, ruang sosialisme masyarakat mengarah pada perpecahan. Sikap etnosentrisme setiap kelompok etnis dibentuk oleh kesadaran persamaan dan perbedaan dalam masyarakat, yang berasal dari faktor politik. Masing-masing suku mewakili kepentingan kolektif, terutama di tahun politik ini. Hal ini menyebabkan konflik etnosentris, yang pada akhirnya bermanifestasi sebagai kebencian satu sama lain. Konflik kecil tidak menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penyelesaian konflik bergantung pada seberapa sadar masyarakat yang berkonflik.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas etnis memainkan peran signifikan dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Polewali Mandar. Elit politik secara sistematik memanfaatkan identitas etnis untuk meraih dukungan, dengan politisasi etnis yang mencerminkan teori instrumentalisme, di mana identitas etnis digunakan untuk kepentingan politik. Dalam konteks dominasi sosial, kelompok etnis dominan seperti Mandar menggunakan politik identitas untuk mempertahankan kekuasaan dalam birokrasi, yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Di sisi lain, politik identitas memiliki dampak positif dengan memperkuat persatuan dan meningkatkan partisipasi politik melalui ikatan kekeluargaan dan solidaritas. Namun, dampak negatifnya mencakup konflik, perpecahan, diskriminasi, dan ketegangan sosial akibat etnosentrisme. Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik identitas etnis di Kabupaten Polewali Mandar menghasilkan efek kompleks vang mempengaruhi baik aspek politik lokal maupun dinamika sosial.

4. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas etnis di Kabupaten Polewali Mandar digunakan untuk memanipulasi dan memobilisasi massa dalam kondisi di mana integritas etnis meningkat dan konflik etnis muncul. Etnosentrisme, yang menganggap etnis sendiri lebih penting daripada etnis lain, berkontribusi pada perbedaan etnis yang signifikan. Aspek primordialisme menjelaskan bagaimana identitas etnis yang diwariskan membentuk sikap etnosentris dan mempengaruhi keputusan politik, sementara konstruktivisme menyoroti pembentukan identitas etnis melalui interaksi sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika politik dan konflik etnis. Instrumentalisme menunjukkan bagaimana elit politik memanfaatkan identitas etnis sebagai alat untuk mobilisasi dukungan dan pencapaian tujuan politik. Oleh karena itu, kepentingan politik yang didorong oleh primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme mempengaruhi dinamika politik dan struktur birokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2013). "Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches." SAGE Publications.

Iqbal, A. M. (2018). "Politik Identitas Etnis Mandar Dalam Pemerintahan Bupati Andi Ibrahim Masdar."

Jurdi, F. (2018). "Pengantar Hukum Pemilihan Umum." Kencana Prenadamedia Group.

Mappasere, S. A., et al. (2019). Pengertian dan Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Pendekatan Sistematis, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahayu, S. K. (2019). "Dinamika Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017: Analisis Media Sosial." Jurnal Politik, 24(3), 210-230.

Rif'an, F. A. (2019). "Politik Identitas Dan Perilaku Pemilih Pada Pilpres 2019 Di Kota Palembang Sumatera Selatan."s

Sahalatua, A. P. (2018). "Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pemilihan DKI Jakarta Periode 2012-2022)."

Siregar, F. (2015). "Dinamika Politik Identitas Etnis dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013." Jurnal Politik Regional, 20(2), 123-145.

Soltau, Roger F. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sugiono. (2014). "Metode Penelitian Kualitatif". Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

Rustan, I. R., & Ariffin, M. (2019). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 4(2).